

## **ABSTRAK**

Undang-Undang 6 tahun 2014 menyebutkan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Badan Usaha yang modalnya dimiliki oleh Desa dan berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa harusnya mampu melihat potensi yang ada di daerahnya, untuk dikelola bersama masyarakat, pihak swasta dan Pemerintah Desa agar tetap terjaga keberlangsungannya. Keberhasilan Desa Ponggok dalam mendirikan serta menjalankan BUMDes Tirta Mandiri menjadikan Ponggok sebagai salah satu desa terkaya dengan pendapatan 9.6 milyar rupiah per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Collaborative Governance mampu mendorong Akuntabilitas dan Transparansi dalam perencanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ponggok pada Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan collaborative governance melalui teknik pengumpulan data dan wawancara pada pihak yang terkait. Collaborative Governance dalam perencanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ponggok ini melibatkan tiga aktor tersebut yaitu Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak Swasta. Berdasarkan data yang didapat, Collaborative Governance mampu mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, partisipasi dari masyarakat dan pihak swasta. Hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Ponggok dan membawa dampak kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok sampai dengan saat ini.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Badan Usaha Milik Desa, Collaborative Governance, Desa Ponggok, Transparansi.**

## **Abstract**

The Law No. 6 of 2014 article 1 mention about the village-owned enterprises as the business entity which the capital is owned by the village in order to be managed for community welfare. The government of village should be able to see the potential of the village to be managed along with the community and private sector to maintain its sustainability. The successful of Ponggok village to establish and run the village-owned enterprises Tirta Mandiri brings the Ponggok village as one of the richest village in Indonesia with the 9.6 billion rupiah income per year. This research aims to see how the ability of the collaborative governance to push accountability and transparency factors in managing the village-owned enterprises in 2016. This research used the method of collaborative governance through the data collection and interview towards the related actors. According to the data, the collaborative governance in the management of Ponggok village-owned enterprises involved three actors such as the government of the village, community and private sector. Collaborative governance be able to push the accountability and transparency in the management of village-owned enterprises by those collaborative actors. The result of collaborative governance can be felt by the villagers in form of welfare.

**Key Words:** *accountability, collaborative governance, Ponggok village, transparency, village-owned enterprises.*